

## Sambut Maulid Nabi, Forkominda Kab. Bogor Gelar Tabligh Akbar

**BOGOR (IM)** - Forum Koordinasi Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kabupaten Bogor, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, menggelar Tabligh Akbar, di Lapangan Tegar Beriman, Senin (26/9) ini.

Tabligh Akbar ini, akan dihadiri oleh Habib Zidan, Habib Segaf Baharun, Habib Nabil, Habib Baghil, kemudian Habib Mahdi Assegaf dan Habib Alwi Assegaf.

Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Tema Tabligh Akbar yakni malam cinta rasul menyambut maulid rasul, doa dari Bogor yang

akan dilaksanakan, ba'da isya di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Rencananya kegiatan tabligh akbar akan berlangsung dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Dengan agenda kegiatan salah satunya, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sholawat bersama, ceramah dan doa penutup.

Acara ini dihelat oleh Forkopimda yakni, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Kapolres Bogor, Kejari, Dandim, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, dan unsur Kecamatan se-Kabupaten Bogor, dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. ● **gio**

## BBM Naik Tak Pengaruhi Wisatawan, Jalur Puncak Tetap Macet

**BOGOR (IM)** - Pasca harga BBM naik, arus kendaraan di kawasan Jalur Puncak terpantau macet di beberapa titik. Polres Bogor masih memberlakukan sistem ganjil genap. Kenaikan pertalite dan solar subsidi pada awal September lalu tidak menjadi hambatan masyarakat untuk berpergian wisata di kawasan Puncak, Bogor.

Kepala Bagian Operasional (KBO) Satlantas Polres Bogor, Iptu Ketut Laswarjana dalam keterangannya, pada Minggu, (25/9) pagi menyebutkan arus kedua arah, baik menuju Puncak dan arah sebaliknya Bogor atau Jakarta ramai lancar.

"Kondisi lalin pagi ini ramai lancar dan terpantau beberapa titik kemacetan akibat antrean kendaraan di beberapa titik," kata Ketut.

Kata dia, antrean kendaraan sebagian besar terjadi di persimpangan seperti di Simpang Gadog, Simpang Megamendung, atau Simpang Pasar Cisarua.

Juga beberapa tempat wisata seperti Cimory Megamendung, Taman Safari, Cisarua, Warung Kaleng, dan Masjid Atta'awun, Puncak.

"Antrean tidak begitu

panjang, sekitar 200 meter. Hal tersebut lantaran adanya keluar masuk kendaraan dan lalu lalang orang di lokasi wisata," papar Ketut.

Sat Lantas Polres Bogor juga menerapkan kebijakan ganjil genap setiap libur akhir pekan di kawasan Puncak. Namun demikian, jalur puncak tetap saja macet. Ketut menyebutkan, kebijakan ganjil genap tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 84 Tahun 2021. Oleh karena itu, petugas mengimbau pengendara untuk menaati peraturan yang berlaku di lapangan.

"Ganjil genap berlaku setiap akhir pekan sesuai Permen, hari ini kendaraan berpelat ganjil yang diperkenankan melintas dan pelat ganjil hanya diminta putar balik atau diimbau mencari alternatif wisata lain, selain Puncak," tambah Ketut.

Pengguna jalan juga diimbau untuk selalu mengutamakan ketertiban dan keselamatan saat berkendara di jalan. Sistem ganjil genap ini diberlakukan untuk meminimalisir volume kendaraan yang akan masuk ke Jalur Puncak. ● **gio**

# 8 | Nusantara



TRADISI PAWAI DONGDANG DI BOGOR

Sejumlah warga berebut hasil bumi usai mengikuti pawai Dongdang di Desa Lemah Duhur, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/9). Pawai Dongdang hasil bumi tersebut dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dalam menyambut peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

TINGGAL DI ZONA RAWAN PERGESERAN TANAH

## Masyarakat Kampung Curug Bojong Koneng Diminta Adaptasi

Untuk mengamankan masyarakat dari bencana pergeseran atau perayapan tanah, salah satu usulan adalah agar Plt Bupati Bogor memotorarium perijinan pembangunan, termasuk usaha jasa wisata yang saat ini marak di sana.

### BABAKAN MADANG (IM)

- Masyarakat di Kampung Curug RW 09 dan RW 15 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor diminta adaptasi dengan lingkungannya yang rawan akan bencana pergeseran atau perayapan tanah oleh Pusat

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Hal itu karena, selain kontur tanah lempung yang kurang dalam menyerap air, di lokasi perbukitan juga terjadi alih fungsi hingga menambah kecepatan bencana pergeseran atau perayapan tanah.

"Kalau hutan atau kebun sudah berubah fungsi karena efek pembangunan, lalu kontur tanah lempung yang kurang dalam menyerap air. Maka hal itu bisa menambah kecepatan bencana pergeseran atau perayapan tanah. Masyarakat Kampung Curug Desa Bojong Koneng harus adaptasi, hindari membangun rumah di zona retakan, karena selain bisa merobohkan bangunan, juga bisa membuat tanah tersebut amblas," kata Agus Budi-yanto penyelidik bumi madya PVMBG kepada wartawan, Minggu (25/9).

Agus Budi-yanto menuturkan bahwa retakan di atas bukit yang kondisinya gundul

cukup panjang baik ke arah utara maupun selatan hingga 1,5 Km, di saat musim penghujan seperti saat ini, maka ini menjadi ancaman dan membahayakan.

"Retakan bervariasi ada yang dalamnya 1 meter, 1,5 meter dan lebih. Kampung Curug kebetulan di zona cekungan dan daerah aliran air, sementara resapan airnya terganggu akibat dampak proses pembangunan (peralihan fungsi lahan)," tutur Agus Budi-yanto.

Kepala Satlak Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Yani Hassan menjelaskan berdasarkan kajian investigasi PVMBG dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), jajarannya mengusulkan ke Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan untuk memotorarium perijinan pembangunan di daerah tersebut.

"Untuk mengamankan masyarakat dari bencana pergeseran atau perayapan tanah, salah satu usulan kami ialah agar Plt Bupati Bogor memotorarium perijinan pembangunan, termasuk usaha jasa

wisata yang saat ini marak di sana. Selain itu, kita juga harus mereview bangunan-bangunan yang sudah ada," jelas Yani Hassan.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) ini menambahkan untuk mencegah tambahan retakan, jajarannya akan menanam tanaman sejenis vetiver.

"Kami akan menanam tanaman sejenis vetiver demi mencegah retakan dan juga pergeseran atau perayapan tanah," tambah Yani.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Ajat Rochmat Jatnika membenarkan bahwa banyak di antara bangunan resto, resort, vila dan lainnya yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

"Kami belum meneliti lebih lanjut, namun memang ada sebagian bangunan (resto, resort, vila dan lainnya) yang belum memiliki IMB. Nanti UPT Tata Bangunan yang akan mengkaji atau mengecek lebih lanjut setiap bangunan yang ada," tukas Ajat. ● **gio**



IDN/ANTARA

### MELESTARIKAN AKSARA JAWA LEWAT BATIK

Dua anak menunjukkan karya batik dengan motif kata-kata dalam aksara Jawa yang dibuatnya di Kampung Batik Laweyan Solo, Jawa Tengah, Minggu (25/9). Aksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kecintaan terhadap aksara Jawa guna melestarikannya sebagai salah satu khazanah budaya Indonesia agar tidak punah.

## Bima Arya: Kota Bogor Siapkan Pusat Pemerintahan Baru

**BOGOR (IM)** - Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan masa pemulihan (recovery) ekonomi pascapandemi Covid-19, Pemerintah Kota Bogor mulai menyiapkan pemindahan pusat pemerintahan baru di bagian Timur Kota Bogor. Hal itu dikatakan Bima Arya saat menghadiri HUT ke-54 Kadin Kota Bogor di Kota Bogor, Sabtu (24/9).

Menurut Bima, perkembangan kemajuan pusat Kota Bogor saat ini begitu pesat. Bahkan pascapandemi, pemulihan ekonomi di Kota Bogor berada di atas kota-kota lain di Indonesia.

Ketika unit usaha di sektor jasa di beberapa kota gulung tikar, di Kota Bogor malah tumbuh berbagai bisnis jasa baru di bidang restoran, kafe, toko dan sebagainya.

"Hal itu terjadi kata Bima Arya karena Kota Bogor memiliki proximity (kedekatan) dengan Jakarta," paparnya.

Untuk itu, lanjutnya, di masa menjelang akhir jabatan 2023, Bima Arya ingin membangun kawasan yang ada di Kota Bogor agar terus berkembang maju.

"Ada rencana memindahkan balai kota (pusat pemerintahan) ke Bogor Timur. Tentu kita akan membangun pusat kota di sana," jelasnya.

Katanya di kawasan baru itu akan ada pengembangan kawasan bisnis Kedung Halang dan sebagainya.

Selain itu, juga bangun jalur pedestrian bertahap di Pandu raya.

Ke depan, kata dia, Pemkot Bogor pun akan kembali membangun jalur pedestrian. Meski sempat beberapa kali menerima kritikan, namun, Bima Arya menilai, pembangunan jalur pedestrian memiliki banyak manfaat bagi pengembangan kota.

"Ini adalah untuk membuat stimulan pembangunan ekonomi di zona-zona itu. Di Pandu Raya, di Ahmad Yani dan jalan-jalan lain," katanya.

Lebih jauh, lanjut Bima Arya, pemindahan pusat pemerintahan juga untuk mengantisipasi pemindahan Ibu Kota Jakarta. Karena menurutnya jika ibu kota berpindah maka Kota Bogor harus memiliki daya tarik yang lebih.

"Kota Bogor akan terdampak pemindahan ibu kota. Bimtek, workshop, seminar akan lebih berkurang. Makanya kita harus lebih seksi lagi untuk destinasi wisata, perdagangan dan sebagainya. Makanya itulah keuntungannya, makanya kita betul-betul mendorong itu," tegasnya. ● **gio**

## Pemkab Bogor Gelar Isbat Nikah Diikuti 31 Pasangan Nikah Siri

**BOGOR (IM)** - Sebanyak 31 pasangan nikah siri di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo mengikuti isbat nikah, di halaman Kantor Desa Ciomas, Jumat (23/9).

Isbat nikah diadakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Kegiatan dilakukan berkolaborasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemkab Bogor, dan seluruh stakeholder lainnya. Hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, Ketua Baznas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemerkesra), dan jajaran Pemkab Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan, dalam Pancakarsa terutama pada Karsa Bogor Berkeadaban, salah satunya ada kegiatan sidang isbat nikah. Kemudian ada juga kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

Artinya mereka baru sah secara agama tapi belum secara negara. Supaya sah secara negara, maka harus mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, yakni dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), terangnya.

Program ini bukan program

"Kita mendorong jajaran perangkat daerah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di sini, di antaranya pengadaan air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan jalan lingkungan dan sebagainya. Termasuk isbat nikah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari sisi kekuatan hukum," jelas Burhanudin.

Burhanudin mengungkapkan, Forkopimda bersama jajaran Pemkab Bogor dan stakeholder lainnya bersinergi pada kegiatan ini. Di Desa Ciomas baru 45 persen yang sudah menikah, punya surat nikah atau dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Artinya mereka baru sah secara agama tapi belum secara negara. Supaya sah secara negara, maka harus mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, yakni dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), terangnya.

la menambahkan, jika tidak memiliki surat nikah maka khawatir berdampak pada persoalan waris, masalah akta kelahiran anak, dan kelengkapan administrasi kependudukan lainnya. Program ini bukan program

dadakan, akan terus kita lakukan secara berkelanjutan.

Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Nurhayati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan P2WKSS.

"Karena banyak aspek yang harus kita laksanakan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan peningkatan peranan wanita untuk mencapai keluarga sehat dan sejahtera," tandasnya.

Nurhayati menyebutkan, selain menjadi program berkelanjutan, hari ini kita laksanakan pelayanan isbat nikah di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo juga sebagai langkah inovatif dalam rangka penilaian P2WKSS tingkat Provinsi Jawa Barat.

"Dengan layanan isbat nikah ini diharapkan akan mempermudah masyarakat mendapatkan legalitas dan administrasi pernikahan secara hukum. Kegiatan ini juga mencerminkan hadirnya negara dalam melayani masyarakat," ujar Nurhayati. ● **gio**



Pemkab Bogor menggelar isbat Nikah yang diikuti 31 pasangan Nikah Siri.

## Implementasi RB dan SAKIP, Bentuk Layanan Publik Berkualitas dan Profesional

**BOGOR (IM)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan Internalisasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) bersama Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kempenan RB RI, Ahmad Hasmy.

Hal ini bertujuan untuk penguatan implementasi RB dan SAKIP di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor di era 4.0, yang berlangsung di Auditorium Setda, Cibinong, Kamis (22/9) lalu.

Ahmad Hasmy mengatakan bahwa sebagian sasaran strategis dan indikator Pemerintah Kabupaten Bogor sudah cukup baik, namun belum baik pada unit-unit kerja atau perangkat daerah. Masih kurang kolaborasi antar unit kerja untuk mencapai sasaran organisasi, karenanya masih harus diperbaiki.

Untuk memberikan pelayanan berkualitas dan terbaik kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berpedoman pada Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Kabupaten Bogor, serta Peraturan Bupati No. 60 tahun 2019 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2019-2024.

"Kami ingin lebih baik lagi dalam implementasi RB dan Sakip, karena di era 4.0 yang penuh disrupti seperti saat ini. Reformasi Birokrasi menjadi keniscayaan dan harus dilakukan secara berkelanjutan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global dan dinamika yang semakin kompleks," ungkap Plt. Bupati Bogor.

Upaya yang dilakukan Pemkab Bogor berhasil meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bogor di tahun 2021 adalah 67,97 dengan kategori B. Nilai tersebut naik dibandingkan tahun 2020 yaitu 67,03. Adapun Nilai Sakip tahun 2020 Adalah 67,94 dan tahun 2021 naik menjadi 68,42 dengan predikat B yang menunjukkan adanya peningkatan dan perbaikan kinerja.

"Tentunya peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi ini, harus diimplementasikan dengan bukti konkrit pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Raih nilai itu berarti pelayanan kita terhadap masyarakat itu mirip atau mendekati kepada keinginan masyarakat," tegas Iwan.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin menyatakan, berbagai upaya implementasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terus dilakukan.

"Kami terus berkomitmen dan berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor," ujar Sekda. ● **gio**